

## **Implementation Of The New Student Acceptance System Policy For Public Junior High School 1 Tulangan, Sidoarjo Regency [Implementasi Kebijakan Sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo]**

<sup>1</sup> Firda Amalia Zumrudah, Hendra Sukmana <sup>2</sup>

*Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

Email Penulis Korespondensi: [firdaamlz18@gmail.com](mailto:firdaamlz18@gmail.com), [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** The aim of the research is to describe and implement the new student admissions system policy for Junior High School 1 Reinforcement in Sidoarjo Regency. In the State Junior High School 1 Tulangan, Sidoarjo Regency, the New Student Admission system uses 4 paths (zoning, achievement, affirmation and transfer of parental duties). This research method uses qualitative, data collection is done by interviews, field observations and documentation. Research informants included school principals, deputy student affairs and head of the admissions committee for new students, deputy curricula and student guardians of Junior High School 1 Tulangan, Sidoarjo regency. The informant determination technique used purposive sampling. The analysis technique in this study is a type of qualitative analysis referring to the theory of Miles and Huberman. The results showed that the implementation of the new student acceptance system policy at the State Middle School 1 Reinforcement Sidoarjo was implemented properly, namely: 1) the implementation of the new student acceptance system policy in terms of its type can be said to be in accordance with field conditions, as follows: a) communication, The New Student Admissions system runs according to regulatory procedures from the central government and local government and also from the Sidoarjo Regency Education and Culture Office. B) The resources that have been prepared from planning, implementing and supervising the registration activities for New Student Admissions. C) Disposition, in the implementation of policies to eliminate educational discrimination so that the quality of education can be equalized, the implementing parties have generally been good. D) Bureaucratic structure, well communicated and coordinated, starting from socialization, preparation, implementation, supervision and reporting of the final results of Acceptance of New Students which will be reported to the Office of Education and Culture. 2) Obstacles to the Implementation of the New Student Admissions System Policy for State Junior High School 1 Reinforcement in Sidoarjo Regency in overcoming the problem of enrollment and acceptance of New Students in overcoming the problems that exist in the implementation of the New Student Acceptance System Policy for Reinforcement 1 State Junior High School 1 in Sidoarjo Regency. A) Parents do not understand PPDB registration using 4 Paths. B) Reinforcement District There is one State Junior High School, causing the SMP in the District to be less evenly distributed

**Keywords:** *Implementation, public policy, New Student Acceptance.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengimplementasi kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam sistem PPDB menggunakan 4 jalur (zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orangtua). Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi lapangan dan dokumentasi. Informan penelitian antara lain Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan dan ketua panitia PPDB, Waka Kurikulum dan Walimurid SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah tipe analisis kualitatif mengacu pada teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem PPDB Di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terimplementasi sebagaimana mestinya yaitu: 1) Implementasi kebijakan sistem PPDB ditinjau dari jenisnya dapat dikatakan sesuai dengan kondisi dilapangan, sebagai berikut : a) Komunikasi, sistem PPDB berjalan sesuai prosedur Peraturan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dan juga Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. b) Sumberdaya yang telah disiapkan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB. c) Disposisi, dalam Implementasi kebijakan upaya menghilangkan deskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu disama ratakan, sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana secara umum sudah baik. d) Struktur Birokrasi, dikomunikasikan dan dikooordinasikan dengan baik, mulai sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil akhir PPDB yang akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Kendala Implementasi Kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah pendaftaran dan penerimaan PPDB dalam mengatasi permasalahan yang ada di implementasi Kebijakan Sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. a) Orangtua kurang memahami

*pendaftaran PPDB dengan menggunakan 4 Jalur. b) Kecamatan Tulangan Terdapat satu SMP Negeri sehingga menyebabkan SMP di Kabupaten kurang merata.*

**Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru)**

## I. PENDAHULUAN

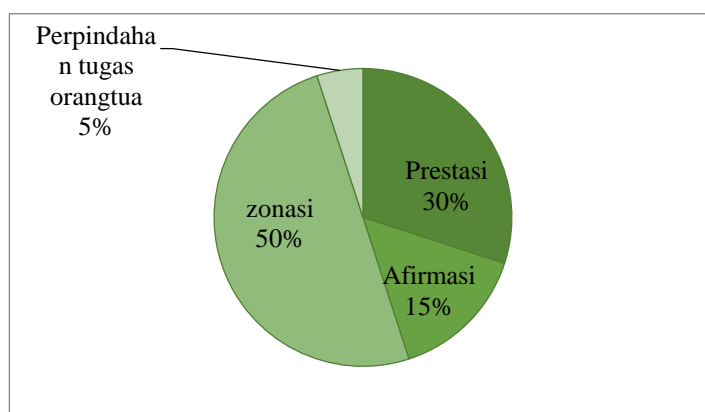
Sistem pendidikan menjadi kewajiban yang dilaksanakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan yang merata. Sebagaimana diatur dalam Reformasi Pendidikan berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang khususnya dalam masa mudanya memerlukan Pendidikan dan pengajaran” [1]. Dalam konteks kesetaraan dan keadilan bidang pendidikan, maka seluruh masyarakat baik laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan. Dengan kesadaran pentingnya pendidikan, maka pemerintah mewajibkan warganya untuk mengenyam pendidikan. Proses penerimaan siswa merupakan elemen penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di negara Indonesia proses penerimaan siswa menerapkan sistem PPDB. PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan suatu proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus yang dirancang oleh sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola untuk menyeleksi penerimaan siswa baru. PPDB dilaksanakan untuk pendaftaran sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Sistem PPDB online terbukti mampu mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan penyelenggara diberbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya PPDB ini dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia dan pendaftaran siswa baru menjadi tertib dan lancar, menjamin proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang diikuti sesuai aturan yang berlaku sehingga adil, transparan dan akuntabel. Sistem PPDB dilaksanakan secara online dan bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendaftaran secara cepat dan transparan, membuat seleksi siswa baru lebih praktis dan efisien serta menyediakan database sekolah yang akurat. Memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat. Sistem PPDB online telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada otoritas publik dan administrasi di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk menjamin pendidikan yang bermutu dan tanpa deskriminasi pemerintah menerbitkan Peraturan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 tentang tentang penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan [2]. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini merupakan kebijakan rutin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya untuk menyambut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya dan menjadi standar operasional secara nasional. Daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 [3].

DiProvinsi Jawa Timur salah satunya Kabupaten Sidoarjo proses penerimaan siswa barunya telah menerapkan sistem PPDB secara online khususnya untuk sekolah tingkat menengah pertama. Sistem PPDB sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2021 pasal 12 ayat 2 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan 4 jalur yaitu jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua [4].

**Gambar 1.1** presentase penerimaan peserta didik bar



**Sumber :** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 pasal 13 menjelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% dari daya tampung sekolah dan jalur prestasi 30% (prestasi nilai akademik 80% dan prestasi hasil lomba 20%) [5]. Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku dalam tahun ajaran 2021/2022. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah memastikan tidak ada kendala server pada sistem PPDB dikarenakan dalam pelaksanaannya SMP sudah bekerja sama dengan seluruh sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo terkait informasi dan tatacara atau prosedur PPDB online yang dapat diakses melalui website PPDB kabupaten Sidoarjo (ppbdsda.net) [6].

Hal ini dilakukan agar orang tua siswa dan calon siswa dapat memahami tata cara penerimaan siswa baru secara online dan bersekolah di sekolah negeri menengah pertama sesuai yang mereka inginkan di Kabupaten Sidoarjo. Namun berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, pendaftaran dan penerimaan PPDB setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Namun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo setiap tahun pendaftaran dan penerimaan PPDB sekolah menengah pertama mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup banyak setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2** Perkembangan jumlah PPDB kabupaten Sidoarjo 2019-2021

| Tahun | Jalur                       | Daftar | Terima |
|-------|-----------------------------|--------|--------|
| 2019  | Afirmasi                    | -      | -      |
|       | Zonasi                      | 17.216 | 11.090 |
|       | Prestasi                    | 2.341  | 2.109  |
|       | Perpindahan tugas orang tua | 455    | 275    |
| 2020  | Afirmasi                    | 2.365  | 2.003  |
|       | Zonasi                      | 14.224 | 6.189  |
|       | Prestasi                    | 2.246  | 2.065  |
|       | Perpindahan tugas orang tua | 610    | 250    |
| 2021  | Afirmasi                    | 3.454  | 1.793  |
|       | Zonasi                      | 12.058 | 6.258  |
|       | Prestasi                    | 2.393  | 2.204  |
|       | Perpindahan tugas orang tua | 602    | 355    |

Sumber :Diolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan angka pendaftaran dan penerimaan siswa di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 sampai tahun 2021 diatas dapat dilihat terdapat penurunan yang cukup banyak pada jalur zonasi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dalam pendaftaran dan penerimaan siswa tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan sekolah menengah pertama di Kabupaten terdapat 18 zona dan berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter. Pengurangan presentase dalam penerimaan siswa jalur zonasi dan peningkatan presentase jumlah penerimaan di jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua dan jalur prestasi dapat menyebabkan penurunan cukup banyak calon didik baru dengan jalur zonasi.

Namun tahun 2020 dan tahun 2021 di jalur afirmasi mengalami penurunan dalam jumlah penerimaan siswa baru tingkat SMP Negeri di kabupaten Sidoarjo hal ini dikarenakan banyak pihak belum memenuhi persyaratan pendaftaran jalur afirmasi salah satunya persyaratan kartu keluarga. Sesuai Permendikbud kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru. Berbeda dengan jalur perpindahan tugas orang tua dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dalam pendaftaran maupun penerimaannya dikarenakan banyak pihak yang sudah memenuhi persyaratan pendaftaran dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi kerja dan surat keterangan dari ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo dan diprioritaskan yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tujuan. Sebagai salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo menggunakan dalam penerimaan siswa baru menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online dengan menggunakan 4 jalur yakni jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua. Perkembangan jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3** Perkembangan jumlah PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Sidoarjo (2021)

| Tahun | Jalur                       | Daftar | Terima |
|-------|-----------------------------|--------|--------|
| 2019  | Afirmasi                    | -      | 79     |
|       | Zonasi                      | 977    | 167    |
|       | Prestasi                    | 100    | 65     |
|       | Perpindahan tugas orang tua | -      | 10     |
| 2020  | Afirmasi                    | 94     | 97     |
|       | Zonasi                      | 903    | 165    |
|       | Prestasi                    | 92     | 60     |
|       | Perpindahan tugas orang tua | -      | 5      |
| 2021  | Afirmasi                    | -      | 108    |
|       | Zonasi                      | 882    | 150    |
|       | Prestasi                    | 110    | 45     |
|       | Perpindahan tugas orang tua | 30     | 7      |

Sumber : Diolah dari SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan angka pendaftaran dan penerimaan siswa SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019–2021 diatas dapat dilihat terdapat penurunan yang cukup banyak pada jalur zonasi dari tahun 2019–2021 dalam pendaftaran dan penerimaan siswa SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan di Kecamatan Tulangan hanya terdapat 1 Sekolah menengah Pertama. Peserta didik baru banyak yang mendaftar jalur zonasi dan setiap tahun mengalami pengurangan presentase dalam penerimaan siswa. Sangat berbeda dengan jalur afirmasi setiap tahun mengalami peningkatan penerimaan didik baru, hal ini dikarenakan setiap tahun presentase jumlah penerimaan naik dan wali murid sudah mengurus dan mempersiapkan surat sebagai syarat-syarat jalur afirmasi. Namun tahun 2020 jalur perpindahan tugas orang tua mengalami penurunan dalam jumlah penerimaan didik baru hal ini dikarenakan banyak pihak belum memenuhi persyaratan pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua, sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan. Di jalur prestasi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup banyak padahal presentase penerimaan mengalami kenaikan. Penurunan penerimaan dikarenakan banyak pihak tidak mengerti syarat yang ada di jalur prestasi.

SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 01 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan melalui jalur jalur prestasi, jalur afirmas, jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua. SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah mengimplementasikan sesuai Permendikbud terkait penerimaan peserta didik baru. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo ingin memberikan pelayanan yang prima masyarakat tanpa deskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel dan keadilan saat Penerimaan Peserta Didik Baru berlangsung.

SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa masalah yang dihadapi diantaranya : pertama, wali murid kurang memahami jalur PPDB hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau informasi terkait penerimaan peserta didik baru yang dilakukan pihak kebijakan dan pihak sekolah. Kedua, Sekolah tidak bisa melihat kemampuan dan prestasi peserta didik baru Ketiga, dikarenakan Kecamatan Tulangan terdapat satu SMP Negeri sehingga menyebabkan penyebaran SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tidak merata. Kebijakan tersebut sesuai dengan skor jarak berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo”.

## II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Saryono (2010), Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif [7]. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Karena peneliti melihat adanya indikasi masalah yang ditemukan saat penelitian terkait banyak wali murid dan didik baru yang masih belum memahami proses pendaftaran dengan menggunakan 4 jalur antarlain jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua.

Dalam penentuan informan merupakan selaku narasumber yang dipergunakan untuk memahami permasalahan yang diteliti, ketersediaan untuk memberikan sebuah informasi secara jelas, teliti dan akurat dan untuk memenuhi data. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan sasaran informan yakni Kepala Sekolah selaku *key informan*, Waka Kesiswaan dan ketua panitia PPDB selaku *Informan*, Waka Kurikulum selaku *Informan* dan Walimurid SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo selaku *informan*. Jenis dan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Kebijakan Sistem PPDB SMPN 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Implementasi kebijakan sistem PPDB dalam dunia pendidikan di Indonesia diberlakukan bagi siswa dan siswi yang hendak menjadi peserta didik baru. Sistem PPDB dirancang khusus dengan rancangan satu sumber atau pusat informasi sebagai server pendaftaran sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat 1 “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” [8]. Kebijakan sistem PPDB bertujuan untuk menciptakan pemerataan mutu sekolah dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu. Dengan adanya kebijakan sistem PPDB, secara perlahan dapat menghapus sekolah pilihan pertama atau sekolah favorit dan pilihan kedua atau sekolah tidak favorit. Beberapa hal yang harus di perhatikan dalam analisis kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru antara lain :

#### Komunikasi

Merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5) [9]. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana (Sekolah Dasar) sebelumnya dalam PPDB diberikan sosialisasi kepada orangtua atau walimurid sebelum saat Ujian Nasional berlangsung. Di dalam sosialisasi tersebut pihak pelaksana (Sekolah Dasar) sebelumnya memberi informasi mengenai jalur yang ada di PPDB dengan menggunakan 4 jalur antarlain jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua. Pihak pelaksana menjelaskan prosedur atau tata cara untuk mendaftar secara mandiri disistem layanan <https://smp-ppdb Sidoarjo.net> dan apabila orangtua atau peserta didik baru tidak bisa mendaftar secara mandiri pihak pelaksana (Sekolah Dasar) sebelumnya menyediakan tempat dan bersedia membantu untuk mendaftarkan peserta didik baru di layanan web <http://smp-ppdb Sidoarjo.net> [10].

Hal tersebut di dukung dengan hasil penelitian terdahulu oleh Miftahul Jannah, dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Progam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMP Negeri 21 Samarinda”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMP Negeri 21 Samarinda belum terimplementasi sebagaimana mestinya hal itu terlihat dari beberapa siswa/siswi dan orang tua siswa/siswi kelas VII (tujuh) SMP Negeri 21 Samarinda yang tidak mendapat informasi terkait informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online 2017 dari pihak Sekolah sebelumnya, karena pembekalan sosialisasi kepada Kepala Sekolah SD terkait informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online tidak disampaikan kembali kepada orang tua siswa/siswi, sehingga membuat para orang tua menjadi bingung, serta kurangnya paham internet bagi orangtua calon peserta didik baru menimbulkan kecurigaan kepada pihak sekolah karena sistem yang dipakai ialah sistem online.

Data di lapangan menunjukkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, dkk bahwasannya dalam menjalankan implementasi sistem PPDB sosialisasi yang dijalankan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo maupun pihak sekolah masih belum maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dan dilihat pada kondisi yang dipaparkan diatas. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya penerimaan siswa baru dikarenakan masih kurang pemahannya orangtua terhadap alur-alur Penerimaan Peserta Didik Baru.

#### Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menjelaskan bahwa sumber daya juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan [11]. Sumber daya terdiri dari empat variabel yaitu : sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung terhadap sistem PPDB. Pihak pelaksana sudah menyiapkan secara matang dan Banyak sekali yang terlibat dalam sumber daya salah satunya Kepala Sekolah, panitia PPDB, anggota Osis, tenaga pendidik, pihak koperasi dan lain-lainnya. Untuk anggaran pihak pelaksana SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam PPDB diambil dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo langsung turun ke Lapangan untuk melakukan promosi ke Sekolah Dasar yang ada dikecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. di Sekolah Dasar murid perwakilan kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo mempresentasikan profil sekolah dan alur-alur dalam sistem PPDB.

Penjelasan diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Nurdian Ramadhani Ansar, dkk pada tahun 2019 yang berjudul "Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar". Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penentuan daya tampung calon peserta didik baru di SMK Negeri 6 Makassar, ditentukan atas beberapa pertimbangan yaitu diantaranya melihat dari jumlah Guru yang tersedia serta sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 6 Makassar. Penerimaan Peserta Didik Baru Online dan anggaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru Online yaitu berasal dari Dana BOS Sekolah itu sendiri.

### **Disposisi**

Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan [12]. Apabila para pelaksana ingin mengimplementasi berjalan efektif dan efisien maka harus memahami dan bersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanakan PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah mempersiapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari administrasi, kepanitian penerimaan peserta didik baru, sarana dan prasana sesuai dengan harapan para pelaksana (SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo) dan semua yang terlibat mengerjakan sesuai dengan jobdesk masing-masing.

Penjelasan diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu Lambertus Pramudya Wardhana dkk 2019 dalam "Manajemen penerimaan peserta didik baru secara online berbasis zonasi, prestasi dan perpindahan" hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen penerimaan peserta didik baru online dengan TIK berbasis zonasi, prestasi dan perpindahan di SMP Negeri Kabupaten Magelang sudah terlaksana dengan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan stakeholder yang terdiri dari pejabat dinas, panitia sekolah, orangtua dan calon siswa.

### **Struktur Birokrasi**

Merupakan salah satu unsur dalam penerapan kebijakan. *Standard Operating Procedures* Edward III (1980) mengemukakan pengertian SOP yaitu berbagai rutinitas yang memungkinkan pihak otoritas membuat berbagai keputusan harian [13]. Menurut Winarno (2014) bahwa keberadaan SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan [14]. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo mampu dikomunikasikan dan dikoordinasi dengan baik mulai dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan PPDB sesuai dengan peraturan atau pagu, sarana dan prasarana, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir penerimaan peserta didik baru sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Penjelasan diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu Nurdian dkk 2019 dalam "Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis online diSMKN 6 Makassar ". Hasil penelitian menjelaskan dalam penentuan daya tampung calon peserta didik baru di SMK Negeri 6 Makassar, ditentukan atas beberapa pertimbangan yaitu diantaranya melihat dari jumlah guru yang tersedia serta sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 6 Makasar . kebijakan sekolah mengikuti petunjuk teknis dari Provinsi sebagai acuan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Online di SMK 6 Makassar. Penerimaan tahun ajaran 2018/2019 terhubung langsung dengan database Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Hal ini menghindari kecurangan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

## **B. Kendala Penerapan Kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo.**

Proses PPDB berbasis online yang dilaksanakan, berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 “Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 82 ayat 1” penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel [15]. Dalam peraturan nomor 17 tahun 2010, Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara online bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Tujuan akhir dari proses PPDB ini yakni untuk memudahkan calon peserta didik memperoleh sekolah dengan proses yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo memperoleh hasil dari penelitian dan pembahasan secara keseluruhan pada bab sebelumnya, Implementasi kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo secara umum, pelaksanaan PPDB nya telah berjalan baik. Namun, terdapat permasalahan diantaranya :

### **Orangtua kurang memahami pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan 4 jalur.**

Pendaftaran PPDB sangatlah penting bagi didik baru yang ingin mendaftarkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Di PPDB dalam pendaftaran menggunakan empat jalur yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Namun siswa/siswi dan walimurid masih banyak yang tidak memahami prosedur atau alur PPDB dengan menggunakan 4 jalur ini. Maka pihak sekolah melaksanakan sosialisasi terhadap walimurid. Sosialisasi diberikan sebelum Ujian Nasional berlangsung. Bagi walimurid dan siswa/siswi sosialisasi yang diberikan pihak sekolah sangat berarti untuk membantu pendaftaran PPDB secara mandiri . namun pada realitanya walimurid dan didik baru masih kurang memahami alur atau prosedur PPDB. Terdapat wali murid yang belum memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Hal tersebut di dukung dengan hasil penelitian terdahulu oleh Miftahul Jannah, dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Progam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMP Negeri 21 Samarinda”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMP Negeri 21 Samarinda belum terimplementasi sebagaimana mestinya hal itu terlihat dari beberapa siswa/siswi dan orang tua siswa/siswi kelas VII (tujuh) SMP Negeri 21 Samarinda yang tidak mendapat informasi terkait informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online 2017 dari pihak Sekolah sebelumnya, karena pembekalan sosialisasi kepada Kepala Sekolah SD terkait informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online tidak disampaikan kembali kepada orang tua siswa/siswi, sehingga membuat para orang tua menjadi bingung, serta kurangnya paham internet bagi orangtua calon peserta didik baru menimbulkan kecurigaan kepada pihak sekolah karena sistem yang dipakai ialah sistem online. Data di lapangan menunjukkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, dkk bahwasannya dalam menjalankan implementasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sosialisasi yang dijalankan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo maupun pihak sekolah masih belum maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dan dilihat pada kondisi yang dipaparkan diatas. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya penerimaan siswa baru dikarenakan masih kurang pemahannya orangtua terhadap alur-alur Penerimaan Peserta Didik Baru.

### **Kecamatan Tulangan terdapat satu SMP Negeri sehingga menyebabkan penyebaran SMP Negeri di Kabupaten kurang merata.**

Di jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini terdapat pro dan kontra di masyarakat khususnya didik baru dan walimurid. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk menghilangkan deskriminasi pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia di samaratakan dan untuk menghilangkan sekolah favorit maupun sekolah non favorit.

Kebijakan jalur zonasi berdasarkan sasaran calon peserta didik baru didalam wilayah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dan berdasarkan skor jarak kedekatan tempat tinggal kesekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter. Selain itu, SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo juga termasuk golongan sekolah favorit yang sangat di idam-idamkan sebagian besar anak di Kecamatan Tulangan. Sedangkan untuk SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sendiri juga satu-satunya SMP Negeri di Kecamatan Tulangan, jadi terkait dengan kebijakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terkait zonasi juga dirasa terlalu kurang adil untuk para calon siswa yang rumahnya jauh dari SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan dirasa juga terlalu terburu-buru sehingga membuat orang tua atau wali murid seperti tidak siap untuk menerima kebijakan ini.

Data dilapangan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lambertus Pramudya Wardhana, Ki Supriyoko 2019. “Manajemen Penerimaan Peserta didik baru secara online berbasis zonasi, prestasi dan perpindahan.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penerimaan peserta didik baru onibe dengan TIK berbasis zonasi, prestasi dan perpindahan di SMP Negeri Kabupaten Magelang sudah terlaksana dengan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan stakeholder yang terdiri dari pejabat dinas, panitia sekolah, orangtua dan calon siswa. Faktor penghambat : 1) regulasi yang

memaksa daerah untuk mengikuti sistem zonasi, 2) pemahaman masyarakat yang kurang terkait regulasi zonasi, 3) kualitas data dapodik yang masih perlu ditingkatkan, 4) data siswa dari lulusan mi tidak langsung terintegrasi sistem sehingga harus ada input manual.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Implementasi kebijakan Sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan menyandingkan dengan kenyataan di lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :1) Implementasi kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari jenisnya dapat dikatakan sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari jenis Implementasi yang akan di jelaskan menurut teori Edward III sebagai berikut : a)Komunikasi yang dilakukan Pihak SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terkait implementasi kebijakan sistem Progam Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan sesuai prosedur Peraturan dari Pemerinta h pusat maupun Pemerintah daerah dan juga Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatem Sidoarjo. b) Sumberdaya yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah mempersiapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB. Dalam hal ini melibatkan banyak orang antarlain terutama pihak sekolah SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo, wali murid dan calon peserta didik baru yang merupakan sasaran dari kebijakan pelaksana PPDB. c) Disposisi : dalam Implementasi kebijakan Sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menghilangkan *deskriminasi* pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu disama ratakan dan untuk mempermudah calon peserta didik baru untuk mendapatkan akses layanan pendidikan sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana secara umum sudah baik. d) Struktur Birokrasi : Implementasi Kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikooordinasikan dengan baik, mulai sosialisasi, persiapan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, pengawasan dan pelaporan hasil akhir Penerimaan Peserta Didik Baru yang akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Kendala Implementasi Kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah pendaftaran dan penerimaan PPDB dalam mengatasi permasalahan yang ada di Implementasi Kebijakan Sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. a sosialisasi yang diberikan kepada walimurid oleh pihak sekolah sebelumnya (Sekolah Dasar) hanya 1 kali saja sebelum ujian nasional berlangsung sehingga walimurid kurang memahami prosedur atau alur PPDB. b) Penerapan kebijakan jalur Zonasi masih belum diterima baik di masyarakat khususnya didik baru dan walimurid. Kebijakan jalur zonasi berdasarkan tempat tinggal kesekolah tujuan dengan kelipatan 100 meter. Namun SMP Negeri dikecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo hanya terdapat 1 SMP. SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan sekolah favorit yang sangat diidam-idamkan sebagian besar anak di Kecamatan Tulangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidah-nya. Ucapan terimakasih dari peneliti diberikan kepada pihak-pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik diantaranya yaitu, Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan dan Ketua Panitia Penerimaan Pesert Didik Baru (PPDB), Wali Murid SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam melengkapi informasi dan memfasilitasi dalam penulisan artikel ini.

## REFERENSI

- [1] Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1
- [2] Peraturan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021
- [3] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021
- [4] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2021 pasal 12 ayat 2
- [5] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 pasal 13
- [6] ppdbnda.net
- [7] Saryono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Aslfabeta, 2010
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1
- [9] A. Arifin, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- [10] <https://smp-ppdbidorjo.net>
- [11] J. Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia, 2010.
- [12] D. Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dinamik Policy Analysis, Yogyakarta: Gafamedia, 2009..

- [13] G. C. Edward, *Implementing Public Policy*, Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980
- [14] E. Winarno, A. Zaki dan S. Community, 3 in 1; Javascrip tjQuery, dan jQuery Mobile, Semarang: PT. Elex Media Komputindo, 2014..
- [15] Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 pasal 82 ayat 1

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*

**Article History:**

*Received: 26 June 2018 | Accepted: 08 August 2018 | Published: 30 August 2018*